



► ANGGARAN PENDIDIKAN

Jaminan Pendidikan Mencapai Rp21,7 Miliar

UMBULHARJO–Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja mencatat adanya tren kenaikan penerima JPD tahun ini.

Alfi Annissa Karim
alfi@harianjogja.com

Kepala UPT JPD Disdikpora Kota Jogja, Mannarima menuturkan tahun ini jajarannya menyalurkan JPD kepada 20.608 peserta didik, mulai dari pemilik Kartu Menuju Sehat (KMS) jenjang TK hingga SMA/ SMK, siswa putus sekolah, kejar paket, perguruan tinggi, hingga panti asuhan dan bantuan biaya pendidikan bagi nonpemilik KMS.

Adapun total alokasi anggaran untuk JPD mencapai Rp21,7 miliar. "Dengan realisasi sebesar Rp21,4 miliar," ujarnya saat ditemui di Kantor UPT JPD, Kamis (16/11).

Menurut Mannarima, penerima JPD tahun ini jauh meningkat. Tahun sebelumnya, penerima JPD hanya sekitar 13.000 peserta didik. Kenaikan ini menjadi bukti

► Besaran JPD yang diterima peserta didik berbeda di tiap jenjang, mulai dari Rp800.000 hingga Rp2 juta.

► UPT JPD dibentuk sebagai salah satu wujud komitmen Pemkot Jogja untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

informasi terkait JPD telah diakses oleh lebih banyak masyarakat. Hal ini tak lepas dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan, mulai dari memanfaatkan publikasi melalui media massa hingga media sosial. "Informasi juga kami sampaikan saat pembagian KMS," katanya.

Sejauh ini, penerima JPD paling banyak adalah peserta didik pemilik KMS. Ini sejalan dengan komitmen Pemkot Jogja untuk menuntaskan pendidikan 12 tahun. Meski begitu, peserta didik non-KMS yang kesulitan membayar biaya pendidikan juga dijamin

Tercatat ada 601 peserta didik penerima JPD non-KMS, meliputi anak putus sekolah, anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, anak korban kekerasan, hingga anak yang orang tuanya tak punya KMS, tapi merasa miskin dan kesulitan membayar tunggakan pendidikan.

Besaran JPD yang diterima peserta didik berbeda di tiap jenjang, mulai

dari Rp800.000 hingga Rp2 juta. Bantuan pendidikan ini tak diberikan secara tunai, melainkan ditransfer melalui Kartu Jogja Berprestasi (KJB). "Penerima JPD bisa menggunakan KJB di gerai yang bekerja sama dengan Pemkot Jogja," katanya. Dia memprediksi kebutuhan JPD di 2024 tak jauh beda dengan 2023. Disdikpora juga menggandeng Dinas Sosial untuk memastikan status penerima JPD, apakah miskin dan perlu mendapatkan bantuan kembali atau tidak.

Kepala Disdikpora Kota Jogja, Budi Santoso Asrori menyebutkan UPT JPD dibentuk sebagai salah satu wujud komitmen Pemkot Jogja untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Tujuannya, jangan sampai ada anak yang tidak melanjutkan sekolah karena alasan biaya. "Kami akan memaksimalkan lama sekolah sebagaimana yang ada dalam indikator *human development index*. Anggarannya kami sudah ada untuk anak usia TK, SMA, kemudian bahkan untuk perguruan tinggi juga ada," ujar Budi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005